



FAKTOR PENENTU KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SEMARANG

Nurfiyani Dyah Pramesti¹⁾; Anita Damajanti²⁾

¹⁾nurfyanipramesti05@gmail.com; ²⁾anitadamajanti@usm.ac.id

¹⁾Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

²⁾Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Proses Artikel

Dikirim : 5/1/2022

Diterima: 21/6/2022

Dipublikasikan: 21/6/2022

ABSTRAK

Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dengan 46 responden perangkat daerah Kabupaten Semarang yang menjabat Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan / Keuangan dan Aset. Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,781 dan sisanya sebesar 21,9% diterangkan oleh variabel bebas lain yang tidak diajukan dalam model penelitian ini.

Kata Kunci :

sumber daya manusia; pengendalian internal; laporan keuangan pemerintah daerah

Abstract

This study aims to empirically examine the influence of the quality of human resources, internal control systems, the application of regional financial accounting systems, and the use of information technology on the quality of local government financial reports in Semarang Regency. Data was collected using a questionnaire. Respondents in this study were employees of regional organizations in Semarang Regency who served as Head of Planning and Finance / Finance and Assets as many as 46 people. This study uses the census method in data collection. 46 questionnaires were sent and 40 were filled in and could be processed. Data analysis used multiple linear regression. The results of hypothesis testing indicate that the variable quality of human resources has an effect, the internal control system, the application of the regional financial accounting system, and the variable utilization of information technology have a positive and significant effect on the quality of local government financial reports. The value of the

coefficient of determination (R Square) is 0.781, which means that 78.1% of the independent variables can explain the dependent variable, while the remaining 21.9% is explained by other independent variables not proposed in this research model.

Keywords:

human resources; internal control; local government financial reports

PENDAHULUAN

Reformasi Pemerintahan dimulai sejak diperlakukan Undang Undang No 32 tahun 2004 tentang perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang semula menganut pola sentralisasi beralih menjadi desentralisasi. Daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengelola dan memanfaatkan potensi daerah yang dimiliki dengan pertanggungjawaban secara nyata dan mewajibkan instansi pemerintah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Reformasi sektor publik tersebut dilakukan tidak hanya sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Triwardana, 2017)

Perkembangan akuntansi sektor publik semakin cepat dalam melaksanakan kegiatan otonomi daerah. Pemerintah daerah yang merupakan yang memegang amanah wajib untuk memberikan tanggungjawaban, melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan kegiatan-kegiatan untuk memberi tanggung jawab untuk pihak pemberi perintah. Pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan atas pelaksanaan dana pemerintah untuk dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik bisa memberikan kepastian tentang keberhasilan suatu kegiatan yang mencakup semua perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Maramis et al., 2018).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Selain menyediakan informasi untuk para pengguna laporan keuangan, laporan keuangan juga merupakan alat atau media bagi sebuah entitas didalam pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik.

Laporan keuangan yang dihasilkan khususnya oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Manimpurung et al., 2018).

Tujuan dan fungsi pelaporan keuangan pemerintah adalah terpenuhinya beberapa karakteristik yaitu (1) kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*); (2) akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*accountability and retrospective reporting*); (3) laporan keuangan pemerintah hendaknya dapat memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk mengetahui pengaruh investasi dan alokasi sumber dana terhadap pencapaian tujuan operasional; (4) laporan keuangan pemerintah hendaknya dapat digunakan untuk memprediksi aliran kas, saldo anggaran (surplus/defisit), dan kebutuhan sumber pendanaan pemerintah dan unit kerja pemerintah; (5) laporan keuangan pemerintah hendaknya

dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, politik dan sosial (Chodijah & Hidayah, 2018).

Menurut Lumintang (Lumintang et al., 2017), Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan harus memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Selain itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai perwujudan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya akan mendapat penilaian untuk menguji kualitasnya berupa opini atas kewajaran informasi keuangan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dan dapat berjalan efektif, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut yaitu kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi. Terbatasnya pegawai pemerintah yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan tanggung jawab dan menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik keterandalan, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. (Philadelphina et al., 2020) Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintahan. Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menyusun laporan keuangan adalah pihak yang menguasai standar akuntansi pemerintahan. Semakin baik kualitas dari standar akuntansi pemerintahan, tanpa didukung sumber daya manusia yang handal, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan sulit mencapai kualitas yang baik (Latjandu et al., 2016).

Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta melihat ketelitian dan keandalan data akuntansi. Serta berperan penting untuk mencegah dan mendekteksi adanya kecurangan sehingga menilai kualitas laporan keuangan daerah diharuskan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia dan juga sumber kekayaan yang dimiliki oleh daerah (Evicahyani & Setiawina, 2015). Jika masih ditemukan penyimpangan dan kebocoran didalam laporan keuangan oleh BPK, hal itu menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah belum memenuhi nilai informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “wajar dengan pengecualian atau *qualified opinion*” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* (Triwardana, 2017).

Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (Evicahyani & Setiawina, 2015) Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu subsistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia dan teknologi informasi. Kegagalan untuk melakukannya memiliki dampak negatif pada proses keuangan organisasi. Kualitas informasi yang buruk dapat mengakibatkan kerugian pada pengambilan keputusan (Yuliani & Agustini, 2016)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik, selain itu dengan menggunakan teknologi informasi salah satunya komputer dalam menghitung dan menyusun laporan keuangan akan lebih cepat, akurat dan konsisten dari pada sistem manual (Kalumata et al., 2016). Pemerintah daerah dengan bantuan alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti adanya perangkat keras komputer dan perangkat lunak sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan lebih efisien dan lebih tepat waktu dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Latjandu et al., 2016),

Pada Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah yang konsisten selama 5 tahun mendapatkan opini WTP antara lain Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Semarang, dan Kota Surakarta. Tahun 2018 Kabupaten Semarang mendapatkan tambahan Dana Insentif Daerah karena prestasinya mendapatkan opini WTP 8 kali berturut-turut (Permana, 2019). Kabupaten Semarang kembali mendapatkan opini WTP pada tahun 2019. Berdasarkan fenomena tersebut maka penelitian ini menguji pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Semarang.

KAJIAN PUSTAKA

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Terbatasnya pegawai pemerintah yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya pemahaman atau penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan tanggung jawab dan menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik keterandalan, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting (Kalumata et al., 2016). Aparat yang memperoleh kuasa dalam mengelola keuangan daerah belum tentu dapat menyusun laporan secara komprehensif (berupa neraca, laporan arus kas, dan laporan realisasi anggaran) dengan baik disebabkan karena pemahaman materi atau konsep akuntansi dan manajemen keuangan yang masih kurang. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan sumber daya manusia yang menguasai akuntansi pemerintahan. Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menyusun laporan keuangan adalah pihak yang menguasai standar akuntansi pemerintahan. Semakin baik kualitas dari standar akuntansi pemerintahan, tanpa didukung sumber daya manusia yang handal, maka laporan keuangan yang dihasilkan akan sulit mencapai kualitas yang baik (Latjandu et al., 2016). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siahaya et al., (2018) Philadelphia et al. (2020), dan Mutiana et al., (2020) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

H₁ : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* (Rahmawati et al., 2018). Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi serta melihat ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dan berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Modo et al. (2016), Lumintang et al., (2017), Rahmawati et al., (2018), dan Listyani & Gunawan, (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif

terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

H₂ : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penerapan standar akuntansi pemerintahan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Siahaya et al., 2018). Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu subsistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia dan teknologi informasi. Kegagalan untuk melakukannya memiliki dampak negatif pada proses keuangan organisasi. Kualitas informasi yang buruk dapat mengakibatkan kerugian pada pengambilan keputusan (Maramis et al., 2018). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lumintang et al., (2017), Rahmawati et al.,(2018), Maramis et al.,(2018), dan Andira et al.,(2020) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

H₃ : Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemanfaatan teknologi informasi dipandang sangat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah daerah dengan bantuan alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti adanya perangkat keras komputer dan perangkat lunak sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan lebih efisien dan lebih tepat waktu dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (Latjandu et al., 2016)

Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin baik yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan pemrosesan transaksi dan data lainnya, keakurasian dalam perhitungan, serta penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih berkualitas (Kalumata et al., 2016)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kalumata et al., (2016), Chodijah & Hidayah, (2018), dan Mutiana et al., (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah :

H₄ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis persamaan regresi linear berganda. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai organisasi perangkat daerah di Kabupaten Semarang yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan / Keuangan / Keuangan dan Aset sebanyak 46 orang. Dalam penelitian ini melakukan uji kualitas data berupa uji reliabilitas dan validitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis berupa uji t dan uji koefisien determinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penyebaran kuesioner di 46 organisasi perangkat daerah di Kabupaten Semarang diperoleh 40 kuesioner yang kembali hingga akhir batas pengambilan kuesioner selama 2 (dua) minggu. Berdasarkan jumlah responden tersebut maka perhitungan skala jawaban responden tertinggi yaitu 5 (lima) dikalikan 40 sama dengan 200, dan skala terendah adalah 1 (satu) dikalikan 40 sama dengan 40. Selisih jawaban tertinggi dan terendah adalah : $200 - 40 = 160$. Dengan menggunakan 5 kriteria, maka rentang sebesar 160 dibagi 5 akan menghasilkan interval jawaban sebesar 32 yang akan digunakan sebagai dasar interpretasi skor yaitu :

Skor 40 – 72	=	Sangat Rendah
Skor 72,01 – 94	=	Rendah
Skor 94,01 – 136	=	Sedang
Skor 136,01 – 168	=	Tinggi
Skor 168,01 – 200	=	Sangat Tinggi

Hasil pengumpulan data menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan penilaian yang tinggi atau cenderung setuju terhadap pertanyaan yang diajukan pada variabel Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini berarti responden setuju dengan pernyataan bahwa laporan keuangan dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Tanggapan Responden mengenai Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan penilaian yang tinggi atau cenderung setuju terhadap pertanyaan yang diajukan. Hal itu berarti responden setuju bahwa dibutuhkan pengetahuan mengenai deskripsi pekerjaan dan peraturan dalam membuat laporan keuangan, dibutuhkan keahlian dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan dibutuhkan perilaku yang independen dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan laporan keuangan.

Jawaban responden pada variabel Sistem Pengendalian Internal menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan penilaian yang tinggi atas variabel sistem pengendalian internal. Penilaian tersebut menunjukkan responden cenderung setuju dengan pembagian tugas, wewenang dan peraturan yang ditetapkan dalam lingkungan kerja, tindakan perencanaan dan pengelolaan risiko yang menyeluruh, aktivitas pengawasan dalam semua transaksi, efektivitas dan efisiensi penyaluran informasi dan komunikasi antar bagian, dan evaluasi hasil setiap kegiatan yang dilakukan.

Jawaban responden pada pertanyaan yang diajukan mengenai variabel Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan penilaian yang tinggi. Berdasarkan penilaian tersebut, dapat diartikan bahwa responden setuju dengan laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan PSAP No. 3 tentang Laporan Arus Kas, laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan PSAP No. 4 tentang Laporan Catatan atas Laporan Keuangan, dan laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan PSAP No. 11 tentang Laporan keuangan Konsolidasi.

Jawaban responden pada pertanyaan yang diajukan mengenai variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi menunjukkan bahwa rata-rata responden memberikan penilaian yang tinggi atas variabel pemanfaatan teknologi informasi. Hal itu berarti rata-rata responden cenderung setuju terhadap teknologi yang mempunyai kemampuan untuk menangkap (*capture*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*), dan menyebarkan (*transmit*) informasi dan sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja baik pemerintahan maupun perusahaan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi.

Uji Kualitas Data

Hasil pengujian validitas data menggunakan *pearson correlation* menunjukkan bahwa skor jawaban responden pada 16 pertanyaan berkorelasi signifikan dengan total skor variabel Kualitas Laporan Keuangan, skor jawaban responden pada 19 item pertanyaan variabel Kualitas Sumber Daya Manusia berkorelasi signifikan dengan total skor variabel tersebut, skor jawaban responden pada 23 item pertanyaan variabel Sistem Pengendalian Intern berkorelasi signifikan dengan total skor variabel, skor jawaban responden pada 13 item pertanyaan Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berkorelasi signifikan dengan total skor variabel, dan skor jawaban responden pada 9 item pertanyaan Variabel pemanfaatan teknologi informasi berkorelasi signifikan dengan total skor variabel. Hal ini menunjukkan bahwa item-item pertanyaan tersebut valid digunakan sebagai indikator untuk mengukur variabel Kualitas Laporan Keuangan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Hasil pengujian reliabilitas data menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* dari variabel kualitas laporan keuangan, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi lebih besar dari 0,700 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel tersebut adalah reliabel. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Kualitas Laporan Keuangan	0,875	Reliabel
2	Kualitas Sumber Daya Manusia	0,822	Reliabel
3	Sistem Pengendalian Internal	0,899	Reliabel
4	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,816	Reliabel
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,722	Reliabel

Sumber : data primer diolah, 2021

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan persamaan regresi linier berganda. Pengujian asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan model yang digunakan dalam penelitian Hasil pengujian Kolmogorov Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,992 lebih besar dari 0,050 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan model regresi layak untuk digunakan. Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,100$ dan nilai VIF ≤ 10 . Hasil ini menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi sehingga model regresi layak untuk dipakai.

Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji gletsjer menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi lebih besar dari nilai signifikansi 0,050 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi dan model regresi layak untuk dipakai.

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji t menunjukkan bahwa pada variabel, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.. Hal ini dapat diartikan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Parsial Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pengujian hipotesis secara parsial menggunakan uji t ditampilkan pada tabel 2. berikut ini

Tabel 2. Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-10,255	6,963		-1,473	0,150
Kualitas SDM	0,297	0,141	0,291	2,103	0,043
Sistem Pengendalian Internal	0,258	0,103	0,344	2,508	0,017
Penerapan SAKD	0,315	0,132	0,246	2,391	0,022
Teknologi Informasi	0,367	0,164	0,201	2,243	0,031

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Hasil pengujian pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen secara simultan menggunakan uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,050. Hasil ini dapat diartikan bahwa kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 3. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,884 ^a	0,781	0,756	3,794

a. Predictors: (Constant), Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan SAKD, Kualitas SDM

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

Hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai *adjusted R Square* sebesar 0,781 yang artinya sebesar 78,1% semua variabel independen yaitu kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi dapat menjelaskan variabel dependen kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya sebesar 21,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

Hasil pengujian hipotesis 1 (H1) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hal itu berarti semakin baik kemampuan atau karakteristik yang dimiliki pengelola keuangan dalam melaksanakan tugas penatausahaan keuangan (akuntansi) untuk menghasilkan laporan keuangan, maka semakin baik informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Latjandu et al., (2016), Siahaya et al., (2018), dan Mutiana et al., (2020) yang menyatakan bahwa dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai, menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan serta sumber daya yang menghasilkannya. Informasi harus dapat dipahami sebagai salah satu indikator berkualitasnya informasi. Berkaitan dengan sumber daya manusia yang menghasilkannya, maka bagian penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau setidaknya memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi. Kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (dapat dipahami). Pengelolaan keuangan daerah yang baik setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang didukung dengan

latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kemampuan yang sesuai dengan bidang tugas yang dijalankannya. Untuk itu, agar terciptanya laporan keuangan yang berkualitas hendaknya didukung oleh aparatur pemerintah yang memahami akuntansi pemerintah itu sendiri, orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus benar-benar memahami dan mengerti bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Hasil pengujian hipotesis 2 (H2) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hal itu berarti semakin baik suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, maka semakin baik informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Modo et al, (2016) yang menyatakan bahwa keahlian, komitmen, dukungan dari pimpinan, kompetensi, pengetahuan tentang operasi perusahaan, dan independensi merupakan atribut penting dalam meningkatkan kualitas pengendalian internal. Atribut tersebut memengaruhi secara positif peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Identifikasi atribut tersebut sangat penting dapat membantu pengendalian internal dalam melakukan evaluasi dan penilaian untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Fungsi pengendalian intern adalah melakukan *review* atas laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada BPK. Dengan demikian pelaksanaan pengendalian internal yang baik dapat mendukung penyajian informasi laporan keuangan berkualitas. Selain itu, Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah diharapkan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian dan analisis dari pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan dengan memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan terhadap pejabat yang berwenang sehingga sistem pengendalian internal dapat berjalan baik dan memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian hipotesis 3 (H3) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hal itu berarti semakin baik prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sebagai persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, maka semakin baik informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lumintang et al., (2017), Rahmawati et al., (2018), Maramis et al., (2018) yang menyatakan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dapat dipercaya, dan dapat diperbandingkan, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Adanya sistem akuntansi keuangan akan lebih mempermudah pemakai sistem akuntansi dalam mengolah data keuangan dan bekerja sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang sudah diterapkan pada sistem akuntansi keuangan tersebut, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik. Hal itu

juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang baik agar mampu mengoperasikan dan memahami sistem akuntansi keuangan yang digunakan. Laporan keuangan bukan hanya sekedar bentuk pertanggungjawaban, namun dapat dijadikan sebagai tolak ukur kinerja suatu instansi. Laporan keuangan juga dijadikan sebagai dasar bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, untuk itu pentingnya kualitas laporan keuangan sangat diperlukan agar dapat menunjang dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik.

Hasil pengujian hipotesis 4 (H4) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hal itu berarti semakin baik pemanfaatan teknologi yang mempunyai kemampuan untuk menangkap (*capture*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*), dan menyebarkan (*transmit*) informasi dan sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja baik pemerintahan maupun perusahaan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi, maka semakin baik informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chodijah & Hidayah, (2018) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung penyajian laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif agar pelaporan keuangan pemerintah memenuhi karakteristik tersebut sehingga perlu optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Suatu entitas akuntansi seperti pemerintah daerah, sudah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten Semarang. Penelitian ini mendukung hasil-hasil penelitian sebelumnya. Temuan ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah kabupaten Semarang agar dalam Menyusun laporan keuangan daerah mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan variabel-variabel tersebut. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena pengumpulan data hanya menggunakan kuesioner. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode wawancara sehingga dapat menggali informasi yang lebih intens mengenai proses penyusunan laporan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andira, A., Silalahi, A. D., & Dewi, S. R. (2020). Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 533–535. <http://dx.doi.org/10.29313/.v6i2.22635>
- Chodijah, S., & Hidayah, N. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus SKPD Provinsi DKI Jakarta). *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 34–48. <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2595>
- Evicahyani, S. I., & Setiawina, N. D. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Ekonomi*

- Dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(1), 1–26.
- Kalumata, M. C. ., Ilat, V., & Warongan, J. D. . (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Review Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Journal Accountability*, 5(2), 152–167. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- Latjandu, I., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2016). Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Journal Accountability*, 5(2), 98–109.
- Listyani, S., & Gunawan, A. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 814–819. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.90>
- Lumintang, G. S., Lambey, L., & Tangkuman, steven J. (2017). Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 950–962.
- Manimpurung, R., Kalangi, L., & Gerungai, N. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2), 241–250.
- Maramis, M. M., Morasa, J., & Wokas, H. R. . (2018). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3), 563–570.
- Modo, S. M., Saerang, D. P. E., & Poputra, A. T. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “GoodWill,”* 7(2), 2013–2015.
- Mutiana, L., Diantimala, Y., & Zuraida. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Satkerdi Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 14(1), 9. <https://doi.org/10.33795/j-adbis.v14i1.83>
- Permana, D. A. (2019). 8 Kali Berturut-turut Terima Opini WTP, Insentif Daerah Kabupaten Semarang Ditambah. *Kompas.Com*. <https://regional.kompas.com/read/2019/11/12/06205551/8-kali-berturut-turut-terima-opini-wtp-insentif-daerah-kabupaten-semarang>
- Philadelphina, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17–35.
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(2), 8–17. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1097>
- Siahaya, E., Asnawi, M., & Allo Layuk, P. K. (2018). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan Daerah*, 1–6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jab/article/view/12258/11837>
- Triwardana, D. (2017). The Influence Of Implementing Accounting Government Standard , Implementing Of Accounting Financial System And Co ... *JOM Fekon*, 4(1).
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 14(1), 56–64. <https://doi.org/10.4324/9780849383250-13>